



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 115 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/O3/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perlu membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi;
- b. bahwa Tim Pembina SAMSAT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk untuk memudahkan koordinasi lintas instansi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang – Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

**Memperhatikan** : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/O3/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dari Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
  - b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
  - c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT;
  - d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT;
  - e. membentuk Sekretariat Tim Pembina SAMSAT sesuai kebutuhan;
  - f. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur;
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahan secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat;

**KELIMA :**

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
 pada tanggal 13 MARET 2024  
 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN DAN KESRA	PEMERINTAHAN	<i>fe</i>
Plt. KEPALA BIRO HUKUM		<i>ki</i>
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	PERATURAN	<i>fg</i>

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 115/KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 MARET 2024****TENTANG TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**SUSUNAN PENGARAH  
TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

<b>PARAF HIERARKI</b>		
ASISTEN DAN KESRA	PEMERINTAHAN	<i>R.</i>
Plt. KEPALA BIRO HUKUM		<i>k</i>
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	PERATURAN	<i>A</i>

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 115/KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 MARET 2024****TENTANG TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**SUSUNAN PENGARAH  
TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/ Ketua Umum
2.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian I
3.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian II
4.	Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian III
5.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I
6.	Kepala Subdit. Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II
7.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendahara
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9.	Wakil Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
10.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

14.	Kanit Operasional PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota
15.	Kasi STNK Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
16.	Kasi BPKB Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
17.	Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota	Anggota
18.	Kepala Kepolisian Resort Kupang	Anggota
19.	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan	Anggota
20.	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara	Anggota
21.	Kepala Kepolisian Resort Belu	Anggota
22.	Kepala Kepolisian Resort Malaka	Anggota
22.	Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao	Anggota
24.	Kepala Kepolisian Resort Alor	Anggota
25.	Kepala Kepolisian Resort Lembata	Anggota
26.	Kepala Kepolisian Resort Flores Timur	Anggota
27.	Kepala Kepolisian Resort Sikka	Anggota
28.	Kepala Kepolisian Resort Ende	Anggota
29.	Kepala Kepolisian Resort Ngada	Anggota
30.	Kepala Kepolisian Resort Nagekeo	Anggota
31.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Timur	Anggota
32.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai	Anggota
33.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat	Anggota
34.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur	Anggota
35.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat	Anggota
36.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat Daya	Anggota
37.	Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua	Anggota
38.	Kasubid Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

39.	Kasubid Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
40.	Adriana Yuliana Mbeo, SE/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
41.	Kasubag Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
42.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
43.	Eugene Cornelis, SE/ Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
44.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
45.	Yulius Beny Lico, S.Sos/ Staf Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
46.	Nurmi Wahyuni, A. Md/ Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
Plt. KEPALA BIRO HUKUM		
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA		